

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Hongaria merupakan salah satu negara yang menjadi *state parties* pada *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*). Hongaria juga bergabung dengan Uni Eropa yang memiliki prinsip kebebasan, solidaritas, demokrasi, kesetaraan, martabat manusia, serta hak asasi manusia sebagai basisnya. Uni Eropa juga ratifikasi *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*). Sehingga, Uni Eropa juga pro terhadap pengungsi. Maka, sebagai *state parties* dari *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*) dan anggota Uni Eropa, Hongaria memiliki kewajiban untuk menjunjung hak-hak pengungsi dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

Fenomena *Arab Spring* tahun 2011 di Timur Tengah menjadi pemicu berbagai pergolakan di Timur Tengah. Pergolakan internal negara-negara Arab mendorong ketidakstabilan negara dan berujung perang di beberapa negara. Perang merupakan mimpi buruk bagi masyarakat Arab yang menguras kerugian harta dan jiwa. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk mengungsi mencari suaka ke wilayah yang lebih aman.

Eropa merupakan wilayah yang aman serta akses ke Eropa lebih menjanjikan dan dekat. Sehingga, ini menyebabkan berbondong-bondongnya pengungsi datang ke Eropa, bahkan mencapai angka 1 juta pengungsi pada tahun 2015.

Sayangnya, banyaknya pengungsi yang datang menjadikan masalah baru bagi Eropa, terutama Uni Eropa. Hal ini dikarenakan saking banyaknya para pengungsi yang harus dikoordinir.

Hongaria menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari krisis pengungsi. Hongaria merupakan negara yang relatif stabil dan aman yang mendorong banyaknya pengungsi Timur Tengah yang datang ke Hongaria. Terlebih lagi, Hongaria adalah negara maju yang akan dianggap mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi pengungsi Timur Tengah.

Hongaria juga merupakan pintu timur untuk masuk ke Uni Eropa. Sebagai konsekuensi dari regulasi Dublin, maka Hongaria bertanggung jawab akan penyeleksian aplikasi para pengungsi. Tiga negara yang mendominasi pengungsi di Hongaria adalah Suriah, Irak, serta Afganistan.

Hongaria sebagai *state parties* dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*) seharusnya menerima pengungsi, namun nyatanya Hongaria menolak pengungsi dalam kasus krisis pengungsi Eropa tahun 2015. Hongaria membangun pagar pembatas di perbatasan setinggi setinggi 4 meter sepanjang 110 mil (175 km) di perbatasan Hongaria-Serbia dan sepanjang 216 mil (348 km) di perbatasan Hongaria-Kroasia. Hongaria juga tidak segan memberikan hukuman terhadap pengungsi yang masih bersikukuh untuk masuk ke Hongaria secara ilegal.

Hongaria bahkan juga menolak Council Decision (EU) 2015/1523 dari Uni Eropa, yaitu pengalihan pengungsi ke masing-masing anggota Uni Eropa berdasarkan kemampuan dan kemakmuran negara anggotanya. Hongaria

berkoalisi dengan *Visegrad countries* (V4) untuk menolak proposal Uni Eropa tersebut. Hongaria memperkuat posisi penolakan pengalihan pengungsi Uni Eropa dengan mengadakan referendum. Hasil referendum menunjukkan 92% masyarakat menolak pengalihan pengungsi, walaupun hanya 43.7% masyarakat Hongaria yang berpartisipasi dalam referendum.

Sikap keras Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah berdasarkan karakter masyarakat Hongaria yang berjuang gigih demi kepercayaan yang dipercayainya. Masyarakat Hongaria tidak akan segan segan untuk melakukan berbagai usaha untuk menjunjungnyanya. Kepercayaan tersebut berasal dari identitas dalam negara Hongaria sendiri.

Pengungsi Timur Tengah memiliki nilai, norma Islam dan serta budaya Arab yang sangat dominan. Sedangkan Hongaria memiliki nilai dan norma Kristen serta budaya Eropa. Nilai kebebasan di Hongaria merupakan kebebasan yang bertanggung jawab pada Tuhan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bebas asalkan tidak mencederai kebebasan pihak lain. Hal ini berbeda dengan pengungsi Timur Tengah yang memiliki nilai kebebasan yang dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadist. Nilai keadilan yang dianut Hongaria dan pengungsi Timur Tengah juga berbeda. Bagi pengungsi Timur Tengah, pria memiliki posisi yang diutamakan serta peran wanita yang dibatasi. Sedangkan, bagi Hongaria wanita haruslah dihormati dengan adanya budaya *ladies first*. Perbedaan tersebutlah yang tidak dapat diterima oleh Hongaria.

Hongaria sangat bangga akan nilai Kristen yang mempersatukan negara Hongaria. Sebelumnya, Hongaria pernah mendeklarasikan sebagai kerajaan

Kristen Katolik tahun 1000. Kebanggaan akan Kristen tersebut dinilai penting bagi Hongaria, sehingga timbul kewajiban untuk menjaganya dari nilai dan norma asing. Hal ini berkaitan akan adanya ancaman nilai dan norma lain yang datang yang akan merubah nilai dan norma Kristen yang sangat berarti bagi Hongaria.

Sebelumnya, Hongaria pernah ditaklukkan oleh Ottoman Turki yang merupakan pengalaman buruk Hongaria. Kerajaan Ottoman Turki sangat menjunjung nilai dan norma Islam yang tidak bisa diterima oleh nilai dan norma Kristen yang telah terkonstruksi di Hongaria. Masyarakat berjuang gigih hingga pada akhirnya Hongaria mampu merdeka dari Ottoman Turki dan melindungi Kristen barat Eropa.

Hongaria juga bangga akan budayanya yang berasal dari budaya Eropa. Budaya Eropa memiliki budaya mengapresiasi wanita serta menganut nilai kebebasan universal. Maka, Hongaria merasa berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan budaya Hongaria.

Hongaria juga memiliki komitmen yang tinggi demi melindungi nilai, norma Kristen serta budaya Hongaria. Ini dibuktikan dengan adanya komitmen tertulis yang tertuang dalam konstitusi dasar Hongaria. Sehingga, perlindungan akan nilai, norma, serta budaya Hongaria menjadi suatu keharusan masyarakat Hongaria untuk melindunginya.

Adanya suatu nilai yang tertanam kuat untuk melindungi nilai dan norma Kristen serta budaya Hongaria menjadikan masyarakat memiliki prasangka buruk atau xenophobia terhadap pengungsi Timur Tengah. Masyarakat Hongaria merasa bahwa pengungsi Timur Tengah yang datang merupakan ancaman akan nilai,

norma, serta budaya Hongaria.

Perpanjangan tangan dari sikap xenophobia tersebut adalah dengan kebijakan luar negeri Hongaria yang menolak pengungsi Timur Tengah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang merupakan refleksi dari nilai dan norma dalam negara Hongaria. Sehingga, alasan kebijakan pemerintah yang menolak pengungsi Timur Tengah adalah adanya perasaan terancam akan nilai dan norma Islam Arab yang dibawa pengungsi Timur Tengah.